

1 WC:25 SISWI / 1 WC:40 SISWA

Perbandingan jumlah ideal jumlah WC:jumlah Murid

1:136

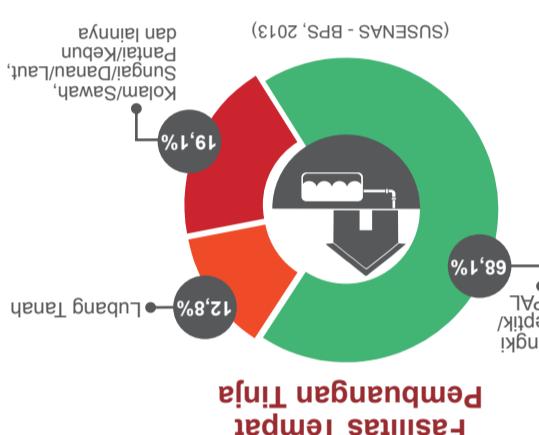


Perbandingan jumlah Murid Sekolah Dasar terhadap jumlah WC

10 Maret 2015 (slbm-indonesia.org)

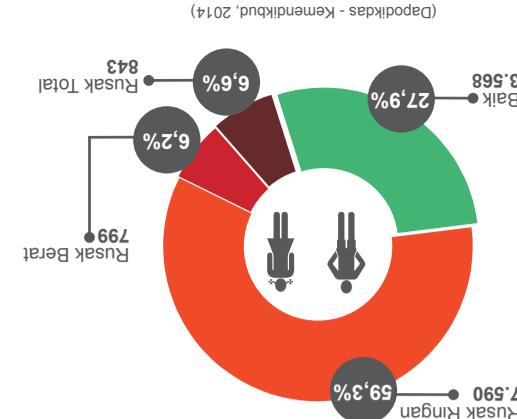


BAB Sembarangan Stop



Fasilitas Tempat Pembuangan Tinggi

(SUSENAS - BPS, 2013)



Jumlah WC Murid Sekolah Dasar Berdasarkan Kondisinya

Akses sanitasi layak perdesaan dan perkotaan kumulatif: 61,9%

Tahun 2019, target akses sanitasi dasar 19%

(Bappenas, 2015)

81%

Target Provinsi Sumatera Utara 2019



(Peringkat 13 dari 33 Provinsi)

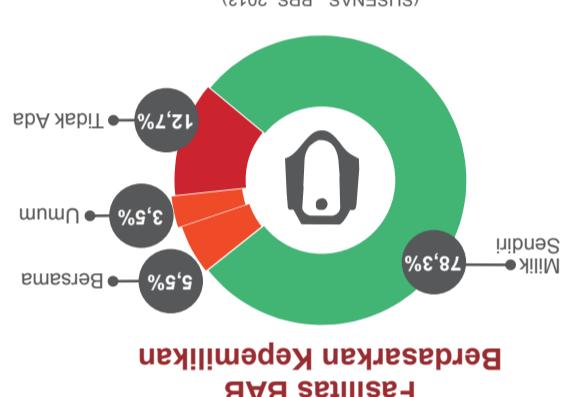
13

10 Maret 2015 (slbm-indonesia.org)



Jumlah Desa yang Mendapat Pemicuan STBM

(SUSENAS - BPS, 2013)



Berdasarkan Kepemilikan Fasilitas BAB

Akses Sanitasi Layak

Capaian dan Kondisi

Daftar Istilah

- Agregat Rencana Investasi Sanitasi:** Agregat angka kebutuhan pembangunan sanitasi yang tersedia di Nawasis. Setiap kabupaten/kota mempunyai periode rencana 5 tahun dengan tahun awal dan akhir dokumen rencana yang beragam. Data di dalam dokumen ini mencakup seluruh tahun dari seluruh kabupaten/kota yang datanya diagregasikan.
- Akses Sanitasi Dasar:** Fasilitas sendiri atau bersama dengan jenis kloset plengsengan atau cublik/cemplung dengan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septic/SPAL atau lubang tanah.
- Akses Sanitasi Layak:** Fasilitas pribadi atau bersama dengan struktur bawah berupa leher angsa dan tangki septic atau saluran perpipaan untuk sistem pengelolaan air limbah terpusat.
- Bantuan Operasional Kesehatan:** Bantuan biaya operasional non-gaji untuk Puskesmas dan jaringannya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif KIA-KB, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, dan pengendalian penyakit untuk mempercepat pencapaian tujuan MDGs.
- Bantuan Operasional Sekolah:** Program pemerintah untuk penyediaan biaya non-personalis bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.
- DAK Sanitasi:** Alokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan sanitasi yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.
- Klaim:** Desa yang menyatakan telah bebas buang air besar sembarangan namun belum diverifikasi oleh tim verifikasi yang terdiri dari pemerintah daerah dan masyarakat.
- Memorandum Program Sanitasi:** Dokumen rencana investasi untuk program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh kabupaten/kota dengan identifikasi sumber anggaran yang tersinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan sanitasi, dan merupakan salah satu tahapan dari program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
- NAWASIS:** Merupakan pusat data dan informasi berbasis internet yang sedang dikembangkan untuk memantau perkembangan sektor air minum dan sanitasi di Indonesia. NAWASIS tidak hanya mengevaluasi kinerja sektor AMPL namun juga sebagai kesatuan sistem yang akan memberikan layanan advokasi dan peningkatan kapasitas dalam rangka meningkatkan pembangunan air minum dan sanitasi, dan juga menjadi penghubung berbagai sistem data dan informasi yang telah ada di sektor AMPL.
- Pemicuan:** Cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
- Strategi Sanitasi Kota:** Dokumen rencana strategis berjangka menengah yang disusun untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi suatu kota/kabupaten yang berisi tentang potret kondisi sanitasi kota saat ini, rencana strategi dan rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah.
- Stunting/Balita Pendek:** Anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Stunting terjadi sebagai akibat dari kurang gizi kronis.
- Terverifikasi:** Desa yang dinyatakan sudah bebas buang air besar sembarangan oleh tim verifikasi.
- Sanitarian:** Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
- Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM):** Pendekatan untuk merubah tata rutin hidgiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
- Tingkat Keaktifan Pokja:** Penilaian tingkat keaktifan Pokja didasarkan pada penilaian dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, serta Memorandum Program Sanitasi dari masing-masing provinsi. Tingkat ketergantungan yang dimaksud adalah ketergantungan pada bantuan eksternal.
- Wirausaha Sanitasi Aktif:** Wirausaha yang ikut berkontribusi mendorong percepatan pencapaian target STBM.

Daftar Singkatan dan Akronim

- AMPL:** Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
- BAB:** Buang Air Besar
- BPS:** Badan Pusat Statistik
- DAK:** Dana Alokasi Khusus
- Dapodiknas:** Data Pokok Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- IPAL:** Instalasi Pengolahan Air Limbah
- IPLT:** Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
- Kemendikbud:** Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kemenkes:** Kementerian Kesehatan
- Kemenkeu:** Kementerian Keuangan
- Kementerian PU-PR:** Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- KIA-KB:** Kesehatan Ibu dan Anak - Keluarga Berencana
- MCK:** Mandi Cuci Kakus
- MDGs:** Millennium Development Goals
- MPS:** Memorandum Program Sanitasi
- NAWASIS:** National Water Supply and Sanitation Information Services
- PAMSIMAS:** Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
- Perpres:** Peraturan Presiden
- Permenkes:** Peraturan Menteri Kesehatan
- Pokja AMPL:** Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
- Poltekkes:** Politeknik Kesehatan
- PP:** Peraturan Pemerintah
- Riskesdas:** Riset Dasar Kesehatan
- RPJMN:** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- SDKI:** Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
- SPAL:** Sistem Pengolahan Air Limbah
- SSK:** Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
- STBM:** Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- SUSENAS:** Survei Sosial Ekonomi Nasional
- UNICEF:** United Nations Children's Fund
- WC:** Water Closet
- WSP:** Water & Sanitation Program, World Bank Group Water Practice

Disclaimer:

Semua data di dalam dokumen ini berasal dari informasi yang dipublikasikan oleh lembaga resmi pemerintah. Pertanyaan/komentar dapat disampaikan ke Pokja AMPL melalui email helpdesk@nawasis.info.
Pembaruan (update) data dan profil dapat dilihat di www.nawasis.info

PROFIL SANITASI 2014 PROVINSI SUMATERA UTARA

Profil ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan dampak dari sanitasi yang buruk di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014. Profil ini memberikan informasi tentang sanitasi layak yang mencakup aspek fasilitas dan infrastruktur air limbah domestik dan perubahan perilaku masyarakat terkait pilar 1 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stop Buang Air Besar Sembarangan).

Profil serupa tersedia untuk 33 provinsi di Indonesia. Diharapkan informasi singkat ini dapat mendorong kerja cerdas dan kerja cepat semua pelaku sanitasi di Indonesia untuk mencapai target 100% akses sanitasi (*universal access*) di tahun 2019.



Proyksi 2020: 14,7 Juta Jiwa
(Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi - BPS, Maret 2015)



Dampak Sanitasi Buruk

Foto-foto Kegiatan

Angka Kematian Balita



40

Per 1.000
Kelahiran Hidup

(SDKI - Kemenkes, 2012)

Insiden Diare Balita



3,3%

(Risksdas - Kemenkes, 2013)

Target Nasional:

24

Per 1.000 Kelahiran Hidup
(RPJMN 2015-2019)

Insiden Diare Nasional:

3,5%

(Risksdas - Kemenkes, 2013)

Stunting/Balita Pendek



42,5%

(Risksdas - Kemenkes, 2013)



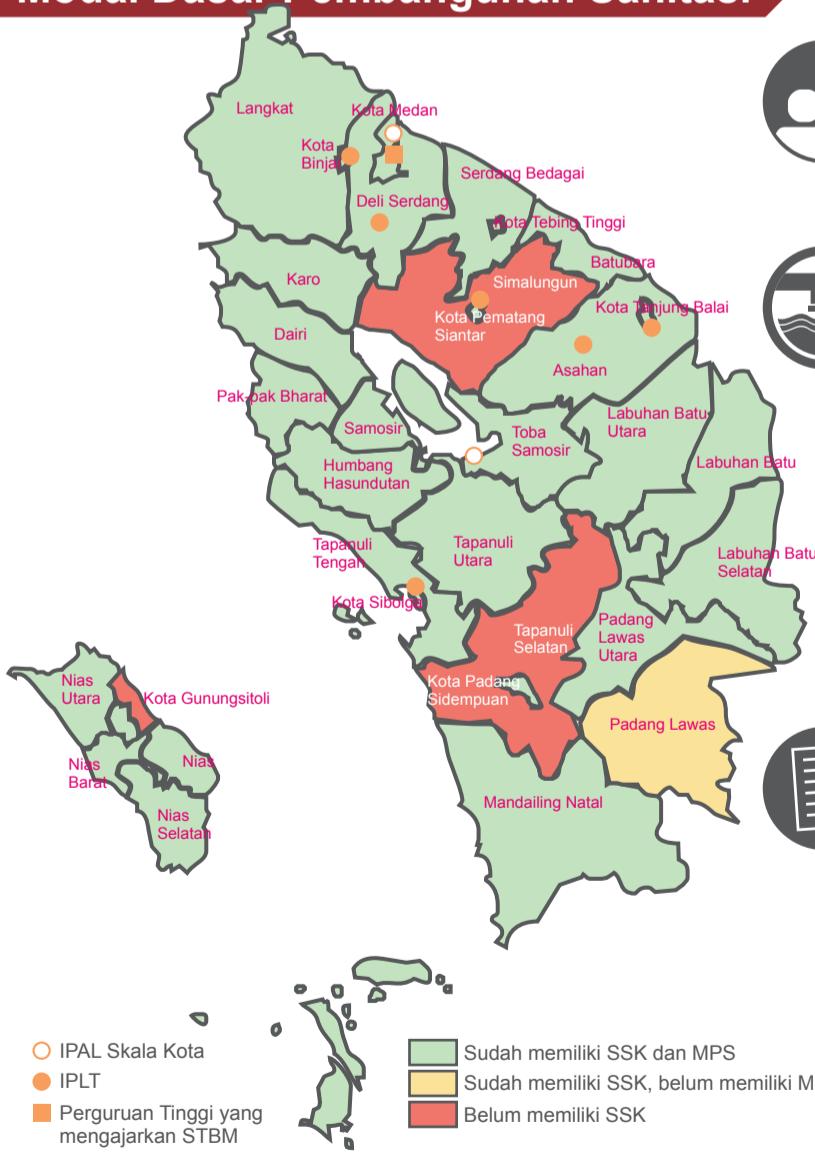
Target Nasional:

28%

(RPJMN 2015-2019)



Modal Dasar Pembangunan Sanitasi



Sumber Daya Manusia STBM



Prasarana

Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kota: 2 Unit

- IPAL Pulo Brayan, Kota Medan
- IPAL Ajibata, Parapat, Kab. Toba Samosir

Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT): 6 Unit

- IPLT Tanjung Slamet, Kab. Deli Serdang
- IPLT Kota Tanjung Balai
- IPLT Kota Binjai
- IPLT Tanjung Pinggir, Kota Pematang Siantar
- IPLT Kota Sibolga
- IPLT Kab. Asahan

(Kementerian PU-PR, 2015)

Regulasi dan Perencanaan

- Perpres No. 185/2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
- Permenkes No. 3/2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas air Dan Pengendalian Pencemaran Air
- 23 dari 26 Kab/Kota di Sumatera Utara telah memiliki dokumen SSK
- 22 Kab/Kota di Sumatera Utara telah memiliki dokumen MPS



Pendanaan

Rp. 344,0 M

Rp. 219,7 M

Rp. 204,1 M



Air Limbah

Persampahan

Drainase

Agregat Rencana Investasi 2012-2018

Berdasarkan sampel MPS 7 Kab/Kota yang tersedia:
Kab. Deli Serdang, Binjai, Toba Samosir, Karo, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Kota Binjai - NAWASIS, 2014)

(Bappenas, 2015)



DAK Sanitasi

Rp. 43,9 Miliar



Bantuan Operasional Kesehatan

Rp. 380 Miliar



Bantuan Operasional Sekolah

Rp. 54,8 Miliar

(Kemenkeu, 2015)

(Kemenkes, 2014)

(Data Triwulan I 2015 - Kemendikbud, 2015)



Keaktifan Pokja AMPL

Ketergantungan

Tinggi Rendah

Tinggi

Sedang

Rendah

Keaktifan Tingkat 1

| Intensitas Tinggi | Ketergantungan Rendah |
|-------------------|--|
| 3 | Intensitas Tinggi, Ketergantungan Rendah |
| 2 | Intensitas Sedang, Ketergantungan Tinggi |
| 1 | Intensitas Rendah, Ketergantungan Tinggi |

(Bappenas, 2014)